

**KONSUMEN DAN SISTEM ONLINE
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Layanan Go Send Pada
Gojek Di Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:
SOYFAHRUL EFFENDY
C100140277**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

KONSUMEN DAN SISTEM ONLINE : Studi Tentang Perlindungan Hukum
Layanan Go Send Pada Gojek Di Surakarta

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

SOYFAHRUL EFFENDY

C100140277

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kelik Wardiono', is written over a horizontal line.

(Dr.Kelik Wardiono S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH PUBLIKASI
KONSUMEN DAN SISTEM ONLINE
(Studi Tentang Perlindungan Konsumen Layanan Go Send Pada Go Jek DiSurakarta)

Oleh :
SOYFAHRUL EFFENDY
C100140277

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Tanggal : 6 Agustus 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

1. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H. (.....)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H.,M.H. (.....)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H.,M.H. (.....)
(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan



(Prof.Dr.H.Khudzaifah Dimyati, SH.,M.H)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Juli 2019

Penulis



Soyfahrul effendy

C100140277

KONSUMEN DAN SISTEM ONLINE
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Layanan Go Send Pada Gojek Di
Surakarta)

Abstrak

GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GO-JEK adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB. Hal ini sesuai dengan peraturan Pengangkut atau Perusahaan angkutan umum Dalam pasal 1 angka 21 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan perjanjian Go-Jek dengan Mitra baik berupa hak dan kewajiban merupakan pelaksanaan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang diperjanjikan adalah untuk; a) “memberikan sesuatu”, memberikan sesuatu (*to geven*), sesuai dengan ketentuan pasal 1235 KUHPerdara, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan hak atau benda; b) “melakukan sesuatu” dan “tidak melakukan sesuatu”. Pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Go-Jek diatur pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 Ayat (1) dan Ayat (2). Objek dalam perjanjian Go-Jek dengan Mitra berupa layanan digital aplikasi sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 17 jo angka 4. Objek perjanjian Go-Jek dengan mitra merupakan layanan jasa pemesanan melalui aplikasi merupakan benda yang dapat diperdagangkan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1332 KUHPerdara bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Perjanjian Go-Jek dengan Mitra berdasarkan ketentuan Pasal 186 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan objek perjanjian antara perusahaan angkutan umum dan penumpang atau pengirim barang. Objek perjanjian bagi perusahaan angkutan umum adalah kewajiban mengangkut orang dan/atau barang berdasarkan perjanjian angkutan.

Kata Kunci: perjanjian Go-Jek, implementasi perjanjian, penyelesaian hukum, perjanjian Go-Jek

Abstract

Go-Jek, AKAB, PAB, DAB and Partners are collaborative partners where each is a stand-alone and independent legal subject. Go-Jek is a company that conducts business activities as a manager of third party service providers in collaboration with the AKAB. This is in accordance with the regulations of Transporters or Public Transport Companies in Article 1 number 21 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The implementation of the Go-Jek agreement with Partners in the form of rights and obligations is the implementation of Article 1234 of the Civil Code, the achievements promised are for; a) "giving something", giving something (*to geven*), in accordance with the provisions of article 1235 of the Civil

Code, means an obligation to surrender rights or objects; b) "do something" and "do nothing". The owners of motorized vehicles, and / or the Go-Jek Transport Company are regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 234 Paragraph (1) and Paragraph (2). The object in the Go-Jek agreement with Partners in the form of application digital services is in accordance with Article 1332 of the Civil Code and Article 1 number 17 in conjunction with number 4. The object of the Go-Jek agreement with partners is ordering services through applications that can be traded, as explained in Article 1332 The Civil Code that: "Only goods that can be traded can become the subject of an agreement".Go-Jek Agreement with Partners based on the provisions of Article 186 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation explains the object of the agreement between a public transport company and a passenger or shipper. The object of the agreement for public transport companies is the obligation to transport people and / or goods based on transport agreements.

Keywords: Go-Jek agreement, agreement implementation, legal settlement of the, Go-Jek agreement

1. PENDAHULUAN

Dewasa ini dunia berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang yang terjadi disemua negara tanpa terkecuali di Indonesia, salah satunya adalah bidang perdagangan. Perkembangan bidang perdagangan tersebut menjadikan mobilitas yang sangat cepat dan fleksibel baik itu orang maupun barang. Dilihat dari letak geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan dimana peran pengangkutan sangat penting karena dapat mempermudah mobilitas baik barang maupun orang. Dengan adanya pengangkutan dapat terjadinya pemerataan terhadap barang maupun orang, sehingga tidak terjadi penumpukan atau kekurangan baik barang maupun orang atau tenaga kerja.

Masalah pada saat ini adalah bagaimana cara memajukan transportasi yang dapat menghasilkan jasa produksi angkutan yang baik, murah, dapat ditawarkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan dapat menyamaratakan baik harga, mutu pelayanan dan waktu dibutuhkan dapat dipenuhi dan bagaimanakah cara fasilitas angkut itu tersedia dalam jumlah yang memadai pada masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan akan jasa pengangkutan menyebabkan banyak bermunculan perusahaan pengangkutan. Pada tahun 2010 di Indonesia muncul model

transportasi baru yaitu Go-jek yang berada dibawah naungan PT. Go-Jek indonesia. Sebenarnya model transportasi ini bisa dibilang model transportasi baru tetap rasa lama artinya model transportasi ini hampir mirip dengan ojek pangkalan, perbedaannya hanya terletak pada penggunaan aplikasi dari smartphone. Go-Jek kini telah tumbuh menjadi on-damand mobile platform dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan, dan berbagai layanan on-damand lainnya. Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia.

Secara umum jenis layanan pada Go-jek diantaranya a) Go-Ride yaitu layanan yang mengantarkan pelanggan dari tempat penjemputan ketempat tujuan.Go-Foo; b) yang merupakan layananpesan anatar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar diaplikasi Go-Jek; c) Go-Send yang merupakan layanan yang akan mengantarkan barang dari pelanggan ketempat tujuan sesuai dengan pemesanan diaplikasi; d) Go-Mart yang merupakan layanan belanja instan untuk membeli barang dari berbagai macam toko yang telah tersedia diaplikasi; e) Go-Shop yang merupakan layanan belanja yang memudahkan pelanggan untuk membeli barang atau makanan ditoko yang tidak terdaftar pada layanan Go-Food dan Go-Mart dalam satu area yang sama; f) Go-Med yang merupakan layanan untuk pelanggan yang ingin membeli obat, vitamin dan kebutuhan kesehatan lainnya diapotek berlisensi yang sudah tersedia dilayanan Go-Med.

Dengan semua layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya layanan pengiriman dokumen atau barang (Go-Send) merupakan salah satu inovasi baru dalam hal pengangkutan barang dan dokumen. Layanan ini dapat mengantarkan barang atau dokumen dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan perusahaan pengangkutan lain yang harus membutuhkan waktu yang lama.

Dalam setiap pengiriman barang dan dokumen pada layanan Go-Send pelanggan yang dalam hal ini merupakan konsumen diminta untuk melakukan

transaksi yaitu berupa perjanjian pemberian jasa (order) melalui media elektronik (smartphone). Sehingga memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dimana pengangkut sepakat untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu, sedangkan pengirim membayar biaya angkut.

Perjanjian yang dibuat secara elektronik merupakan suatu dokumen elektronik, yang mana setiap informasi elektronik yang dibuat, dikirim, diterima atau disimpan yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui perangkat elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 7 jo angka 14 UU No 11 Tahun 2008, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan mengirimkan dan/atau menyebarkan elektronik.

Dibalik kemudahan-kemudahan dari berbagai layanan yang ditawarkan oleh pihak Go-Jek salah satunya dalam hal pengiriman barang atau yang disebut Go-send terdapat juga berbagai masalah yang menyertainya salah satunya ketidaksesuaiannya dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 47 ayat (2) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan menjadi sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa hanya mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang yang dikelompokkan menjadi kendaraan bermotor umum. Dalam pasal 137 ayat (3) menyebutkan: “angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang”. Dalam hal ini layanan Go-Send dalam Go-Jek proses pengangkutan barang atau dokumen menggunakan sepeda motor.

Pelanggan yang dalam hal ini merupakan pengguna jasa layanan Go-Send pada Go-Jek Indonesia, perlu dilindungi kepentingannya. Dalam menggunakan jasa ini pengguna jasa layanan harus menyetujui syarat-syarat yang layanan yang terdapat dalam ketentuan aplikasi. Karena didalamnya menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak. Sehingga perusahaan juga harus memberikan informasi yang jelas dan tidak mengelabui. Tetapi pada kenyataannya sering salah satu pihak merasa dirugika

dalam perjanjian itu. Baik itu kerugian yang secara nyata/terlihat dialami oleh konsumen (kerugian materil) maupun kerugian yang tidak terlihat (imateril) seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan atau yang diperjanjikan tidak sesuai dengan yang diharapkan para pihak atau terjadi wanprestasi dan overmacht. Adapun bentuk wanprestasi yang dapat terjadi antara lain adalah barang atau dokumen tersebut datang tidak sesuai waktu yang diperjanjikan, rusak atau bahkan hilang.

Tidak dipungkiri bahwa selama ini konsumen berada pada posisi yang lemah dan cenderung menjadi korban. Karena pengguna jasa berada dalam posisi penawaran, sehingga mau tidak mau apabila ingin menggunakan layanan tersebut harus menyetujui ketentuan yang ditetapkan oleh pengirim. Oleh karena itu konsumen atau dalam hal ini pelanggan layanan Go-Send pada Go-jek haruslah dilindungi. Sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa dalam hal ini diatur di Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: a) Bagaimana konstruksi hukum dalam perjanjian layanan Go-Send pada Go-Jek?; b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggan layanan Go-Send pada Go-Jek?

2. METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan doktrinal, pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai lembaga yang terlepas dari semua lembaga-lembaga lain yang terdapat dalam masyarakat. Sehingga pengkajian yang dilakukan hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan tertulis yang dikaitkan dengan objek yang diteliti.

Penulis menggunakan metode pendekatan normatif dengan jalan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan penemuan hukum *in-concreto*, karena yang dilakukan adalah dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum Dalam Perjanjian Layanan Go-Send Pada Go-Jek

Perjanjian Go-Jek dengan Mitra dilakukan berdasarkan Pasal 1320 KHUPerdata yaitu a) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b) kecakapan membuat suatu kontrak; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal. Perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat.

Kerjasama Go-Jek dan Mitra merupakan jenis Pengangkut atau Perusahaan angkutan umum sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 21 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Pelaksanaan perjanjian Go-Jek dengan Mitra baik berupa hak dan kewajiban merupakan pelaksanaan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi yang diperjanjikan adalah untuk; a) “memberikan sesuatu”, memberikan sesuatu (*to geven*), sesuai dengan ketentuan pasal 1235 KUHPerdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan hak atau benda; b) “melakukan sesuatu” dan “tidak melakukan sesuatu”.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengemudi atau Mitra selaku pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Go-Jek diatur pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 Ayat (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi; Ayat (2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas

kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GO-JEK adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB. Hal ini sesuai dengan peraturan Pengangkut atau Perusahaan angkutan umum Dalam pasal 1 angka 21 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

Pelaksanaan perjanjian Go-Jek dengan Mitra baik berupa hak dan kewajiban merupakan pelaksanaan Pasal 1234 KUHPdata, prestasi yang diperjanjikan adalah untuk; a) “memberikan sesuatu”, memberikan sesuatu (*to geven*), sesuai dengan ketentuan pasal 1235 KUHPdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan hak atau benda; b) “melakukan sesuatu” dan “tidak melakukan sesuatu”.

Pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Go-Jek diatur pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 Ayat (1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/ atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/ atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi; Ayat (2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.

3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Layanan Go-Send Pada Go-Jek Kewajiban

- a. Dalam menyediakan jasa melalui Aplikasi GO-JEK, Mitra setuju untuk mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh GO-JEK ataupun AKAB sebagai berikut:
- b. Mitra wajib untuk mematuhi setiap peraturan lalu lintas, undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku;

- c. Mitra wajib untuk mengenakan jaket dan helm GO-JEK yang dipinjamkan kepada Mitra oleh GO-JEK atas biaya yang dikenakan oleh GO-JEK yang akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian terpisah. GO-JEK mempunyai hak untuk mengenakan kepada Mitra sanksi dalam jumlah yang dapat ditentukan oleh GO-JEK;
- d. Mitra wajib untuk menjaga kebersihan penampilan, berpakaian rapi, bersepatu, menggunakan seragam berupa jaket dan helm yang disediakan GO-JEK dan memelihara jaket dan helm yang disediakan GO-JEK;
- e. Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkoba ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh;
- f. Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayaan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya;
- g. Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana;
- h. Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak;
- i. Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GO-JEK ataupun AKAB maupun Konsumen, karyawan dan afiliasi dari GO-JEK dan AKAB;
- j. Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GO-JEK ataupun AKAB;
- k. Mitra dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh GO-JEK ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GO-JEK ataupun AKAB maupun afiliasi GO-JEK ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GO-JEK ataupun AKAB, sebagaimana berlaku;

- l. Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK;
- m. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku;
- n. Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar Persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada Mitra oleh GO-JEK maupun AKAB melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.
- o. Mitra menyetujui (i) untuk melaporkan kepada GO-JEK maupun AKAB dengan segera apabila Mitra melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini dan/atau kode etik yang telah ditentukan ataupun mengetahui bahwa adanya pelanggaran Perjanjian ini dan/atau kode etik yang dilakukan oleh mitra GO-JEK maupun AKAB lainnya dan (ii) untuk menerima dan menjalankan setiap sanksi yang diberlakukan oleh GO-JEK maupun AKAB yang telah diinformasikan oleh GO-JEK maupun AKAB kepada Mitra sebelumnya melalui media elektronik (antara lain info driver yang terdapat pada <https://driver.go-jek.com/hc/id>) dan media komunikasi lainnya yang dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.
- p. Mitra menyetujui bahwa semua risiko maupun kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian Mitra, yang termasuk namun tidak terbatas kepada keterlambatan Mitra dalam menyediakan jasa kepada Konsumen, kecelakaan dan kehilangan barang pada saat pengantaran, yang mungkin timbul dari maupun sehubungan dengan penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen merupakan tanggung jawab Mitra.
- q. Dengan ini Mitra menyetujui bahwa maupun GO-JEK maupun AKAB tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, termasuk kerugian tidak langsung yang meliputi kerugian keuntungan, kehilangan data, cedera pribadi atau kerusakan properti sehubungan dengan, atau diakibatkan oleh penggunaan Aplikasi GO-

JEK, maupun penyediaan jasa oleh Mitra kepada Konsumen. Mitra menyetujui bahwa AKAB tidak bertanggung jawab atas kerusakan, kewajiban, atau kerugian yang timbul karena penggunaan atau ketergantungan Mitra terhadap Aplikasi GO-JEK atau ketidakmampuan Mitra mengakses atau menggunakan Aplikasi GO-JEK.

- r. Mitra dengan ini berjanji untuk membebaskan dan memberikan ganti rugi (apabila ada kerugian) kepada GO-JEK, AKAB, para karyawan GO-JEK, para karyawan AKAB, afiliasi dari GO-JEK maupun afiliasi dari AKAB dari semua tuntutan maupun kewajiban yang mungkin timbul dikarenakan kelalaian Mitra sebagaimana dinyatakan dalam pasal ini maupun yang mungkin timbul dikarenakan pelanggaran Mitra atas Persyaratan.
- s. Mitra menyetujui bahwa apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GO-JEK maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GO-JEK maupun AKAB, GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GO-JEK maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku.

Objek dalam perjanjian Go-Jek dengan Mitra berupa layanan digital aplikasi sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdata bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Perjanjian antara Go-Jek dengan mitra berupa layanan jasa aplikasielektronik mengacu pada pasal 1 angka 17 jo angka 4 adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,

menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Driver dalam melaksanakan kewajibannya merupakan objek perjanjian diantaranya adalah; a) Pasal 1332 KUHPdata menjelaskan Barang-barang yang dapat diperdagangkan; b) Pasal 1333 KUHPdata menjelaskan Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung; c) Pasal 1334 Ayat (2) menjelaskan Barang barang yang akan ada dikemudian hari berupa pesanan baik makanan atau minuman.

Ketentuan pasal 186 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan objek perjanjian antara perusahaan angkutan umum dan penumpang atau pengirim barang. Objek perjanjian bagi perusahaan angkutan umum adalah kewajiban mengangkut orang dan/atau barang berdasarkan perjanjian angkutan. Objek perjanjian bagi penumpang atau pengirim barang adalah melakukan pembayaran biaya angkutan penumpang atau biaya pengiriman barang (courier), Peraturan ini sesuai dengan isi perjanjian bahwa; a) Sistem transaksi dengan non tunai yaitu melalui Go-Pay untuk;b) Mengganti kerugian apabila tidak sesuai dengan pesanan.

Ketentuan perjanjian mengenai bahwa mitra apabila Mitra melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini maupun kode etik yang ditetapkan oleh GO-JEK maupun AKAB maupun dalam hal Mitra tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh GO-JEK maupun AKAB, GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk memberikan sanksi kepada Mitra dalam bentuk yang ditentukan oleh GO-JEK maupun AKAB, termasuk, namun tidak terbatas kepada, pemberian peringatan tertulis, pembatasan atau penolakan akses Mitra kedalam Akun Mitra dalam Aplikasi GO-JEK, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata (termasuk untuk ganti rugi) maupun pidana, sebagaimana berlaku merupakan konsekuensi dari perjanjian apabila mitra melakukan cedera janji atau wanprestasi.

Menurut prof.Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat dikategorikan menjadi empat macam, yaitu antara lain: a) Tidak melakukan apa yang disangupi akan dilaksanakan; b) Melaksanakan apa yang yang dijanjikan, tetapi sebagaimana yang dijanjikan; c) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; d) Melakukan sesuatu yang emnurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bila mitra melakukan anprestasi maka harus mengganti biaya kerugian yang diderita karena tidak dipenuhinya prestasi pada tengat waktu yang telah ditentukan. Hal ini terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa : “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lali memenuhi perikatannya, tetapi melalaikanya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat, hanya dapat diberikan atau dibuat dlam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Jenis wanprestasi dalam perjanjian antara Go-Jek dengan Mitra adalah; a) Mitra dilarang minum minuman keras, mabuk, madat, memakai narkotika ataupun berada dalam keadaan dimana Mitra tidak mempunyai kesadaran penuh; b) Mitra dilarang melakukan perbuatan asusila, penganiayan, penghinaan, penipuan atau pengancaman pihak ketiga baik Konsumen, mitra kerja lainnya ataupun pihak ketiga lainnya; c) Mitra dilarang membujuk mitra kerja lain melakukan tindakan yang dapat diancam hukuman pidana; d) Mitra dilarang, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, melakukan perbuatan atau membiarkan diri sendiri, Konsumen, dan/atau mitra kerja lainnya berada dalam keadaan yang dapat menimbulkan bahaya ke masing-masing pihak; e) Mitra dilarang melakukan kegiatan, baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang dapat menghasilkan pencemaran nama baik GO-JEK ataupun AKAB maupun Konsumen, karyawan dan afiliasi dari GO-JEK dan AKAB; f) Mitra dilarang untuk menentukan harga untuk jasa yang diberikan kepada Konsumen melalui Aplikasi GO-JEK selain dari harga yang telah ditentukan dan disetujui oleh GO-JEK ataupun AKAB; g) Mitra

dilarang untuk membongkar atau menyebarluaskan informasi yang diberikan oleh GO-JEK ataupun AKAB, baik melalui Aplikasi GO-JEK maupun melalui cara lainnya, karyawan dari GO-JEK ataupun AKAB maupun afiliasi GO-JEK ataupun AKAB kepada Mitra tanpa persetujuan tertulis dari GO-JEK ataupun AKAB, sebagaimana berlaku; h) Mitra dilarang untuk meminta uang tambahan dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas kepada dalam bentuk 'tips' kepada Konsumen selain dari harga maupun biaya jasa yang diberikan oleh Mitra yang akan ditentukan melalui Aplikasi GO-JEK; i) Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dilarang oleh hukum ataupun dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berlaku; j) Mitra dilarang melakukan setiap tindakan yang dapat melanggar Persyaratan, kebijakan maupun kode etik yang telah diinformasikan kepada Mitra oleh GO-JEK maupun AKAB melalui media elektronik dan media komunikasi lainnya yang dapat dipilih oleh GO-JEK maupun AKAB.

Objek dalam perjanjian Go-Jek dengan Mitra berupa layanan digital aplikasi sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Perjanjian antara Go-Jek dengan mitra berupa layanan jasa aplikasielektronik mengacu pada pasal 1 angka 17 jo angka 4 adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan atau menyebarkan informasi elektronik.

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu obyek perjanjian. Pasal 1333 KUHPerdara menjelaskan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan. Dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah baang tidak ditentukan atau tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Objek perjanjian Go-Jek dengan mitra merupakan layanan jasa pemesanan melalui aplikasi merupakan benda yang dapat

diperdagangkan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1332 KUHPerdara bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

Menurut subekti, mengenai objek perjanjian ditentukan bahwa : a) Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak harus cukup jelas untuk menetapkan kewajiban masing-masing; b) Apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Konstruksi Hukum Dalam Perjanjian Layanan Go-Send Pada Go-Jek

GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GO-JEK adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB. Hal ini sesuai dengan peraturan Pengangkut atau Perusahaan angkutan umum Dalam pasal 1 angka 21 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan perjanjian Go-Jek dengan Mitra baik berupa hak dan kewajiban merupakan pelaksanaan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi yang diperjanjikan adalah untuk; a) “memberikan sesuatu”, memberikan sesuatu (*to geven*), sesuai dengan ketentuan pasal 1235 KUHPerdara, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan hak atau benda; b) “melakukan sesuatu” dan “tidak melakukan sesuatu”.

Pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Go-Jek diatur pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 Ayat (1) dan Ayat (2).

4.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Layanan Go-Send Pada Go-Jek

Objek dalam perjanjian Go-Jek dengan Mitra berupa layanan digital aplikasi sesuai dengan Pasal 1332 KUHPerdara dan Pasal 1 angka 17 jo angka 4. Objek perjanjian Go-Jek dengan mitra merupakan layanan jasa pemesanan melalui aplikasi merupakan

benda yang dapat diperdagangkan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1332 KUHPerdata bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Perjanjian Go-Jek dengan Mitra berdasarkan ketentuan Pasal 186 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan objek perjanjian antara perusahaan angkutan umum dan penumpang atau pengirim barang. Objek perjanjian bagi perusahaan angkutan umum adalah kewajiban mengangkut orang dan/atau barang berdasarkan perjanjian angkutan.

4.2 Saran

Diharapkan kedepannya perjanjian jasa Go-Send pada Go-Jek lebih mementingkan hak daripada driver, dikarenakan realita dan isi perjanjian banyak terjadi perbedaan.

Diharapkan kedepannya driver Go-Jek memberikan pelayanan sesuai dengan isi perjanjian kepada konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Soeprapto, Hartono. 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta: Liberty.
<http://m.liputan6.com> diakses pada 07 mei 2018
<http://www.go-jek.com>---- diakses tanggal 07 mei 2018
- R. Subekti, 1987. *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Bandung.
- Tjakranegara, Soegijatna. 1996, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Reneka Cipta.
- Wijaya, Andika. 2016. *Aspek hukum bisnis transportasi jalan online*, jakarta, Sinar grafika.